UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Politik Anggaran: Relasi Kuasa Antar-Aktor dalam Penganggaran Pengelolaan Sampah di APBD DIY 2024
Ruby Cenia Sabarno, Dr. Rer. Pol. Mada Sukmajati, S. I. P., M. P. P.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
KATA PENGANTAR iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
INTISARI x
ABSTRACT xi
BAB I PENDAHULUAN 12
A. Latar Belakang 12
B. Rumusan Masalah 17
C. Literature Review 17
D. Kerangka Teori 22
E. Metode Penelitian 36
BAB II KEPENTINGAN DAN PEMETAAN AKTOR 43
A. Masyarakat melalui WALHI 43
B. DLHK dan DPUPESDM 46
C. TAPD 48
D. DPRD 51
E. Konflik yang Terjadi Antar-Aktor 53
F. Kesimpulan 54
BAB III NEGOSIASI DALAM POLITIK ANGGARAN SAMPAH 58
A. Keterbatasan WALHI, DLHK, dan, DPUPESDM 58
B. *Deadlock* Negosiasi Antara TAPD dengan DPRD 63
a. Aktor Kurang Memahami Kepentingan Satu Sama Lain 64
b. Tidak Terciptanya Pilihan Yang Saling Menguntungkan 65
c. Ketiadaan Kriteria Objektif 68
d. BATNA Tidak ditetapkan 69
C. Kesimpulan 70
BAB IV DOMINASI DALAM POLITIK ANGGARAN SAMPAH 73
A. Gubernur sebagai *Veto Player:* Mengubah Arah Kebijakan, Bukan Mempercepat Penyelesaian 73
a. Lemahnya Tekanan Publik sebagai Pendorong Percepatan Kebijakan 74

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Politik Anggaran: Relasi Kuasa Antar-Aktor dalam Penganggaran Pengelolaan Sampah di APBD DIY 2024
Ruby Cenia Sabarno, Dr. Rer. Pol. Mada Sukmajati, S. I. P., M. P. P.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. Beban Fiskal Pengelolaan Sampah dan Pengalihan Kewenangan Berbasis UU Nomor 23 Tahun 2014 75
c. Ketiadaan Beban Elektoral dalam Sistem Kesultanan 77
B. Kepatuhan OPD dan DPRD terhadap Kebijakan Desentralisasi 78
a. Kepatuhan sebagai Konsekuensi Kedudukan Gubernur sebagai Raja 78
b. Respons Tiap OPD terhadap Kebijakan Desentralisasi 79
C. Kesimpulan 81
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Limitasi Penelitian 89
DAFTAR PUSTAKA 90